

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk berikut:

- Globalisasi produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara, dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Hal ini dilakukan baik karena upah buruh yang rendah, tarif bea masuk yang murah, infrastruktur yang memadai ataupun karena iklim usaha dan politik yang kondusif. Dunia dalam hal ini menjadi lokasi manufaktur

- Globalisasi pembiayaan. Perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi (baik dalam bentuk portofolio ataupun langsung) di semua negara di dunia. Sebagai contoh, PT Telkom dalam memperbanyak satuan sambungan telepon, atau PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol telah memanfaatkan sistem pembiayaan dengan pola BOT (*Build-Operate-Transfer*) bersama mitrausaha dari manca negara.
- Globalisasi tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional atau buruh kasar yang biasa diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi maka *human movement* akan semakin mudah dan bebas.
- Globalisasi jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui: TV, radio, media cetak dll. Dengan jaringan komunikasi yang semakin maju telah membantu meluasnya pasar ke berbagai belahan dunia untuk barang yang sama. Sebagai contoh : KFC, celana jeans levi's, atau hamburger melanda pasar dimana-mana. Akibatnya selera masyarakat dunia -baik yang berdomisili di kota ataupun di desa- menuju pada selera global.
- Globalisasi Perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyederhanaan tarif serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif

Dengan demikian kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi semakin cepat, ketat, dan *fair*.

Dampak positifnya Indonesia bisa ikut berperan dalam permainan dunia terutama dalam liberalisasi perdagangan, sehingga akan memacu pertumbuhan dan pembangunan di Indonesia. Sedang dampak negatifnya adalah terjadinya krisis nasional atau krisis multi dimensi yang bermula dari krisis moneter, krisis ekonomi, krisis politik, krisis keamanan dan krisis kepercayaan. Kenyataannya krisis ini justru berkepanjangan sehingga mengganggu pencapaian kehidupan bangsa menuju kesejahteraan yang sesungguhnya. Untuk mengatasi hal itu diperlukan pemerintah yang demokratis dan konstitusional dengan penyelenggara negara nasionalis yang mengutamakan persatuan dan kesatuan, profesional, berdaya guna, produktif, transparan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan berorientasi pada peningkatan pembangunan. Seperti diamanatkan dalam GBHN bahwa diperlukan tekad, komitmen dan kebersamaan yang kuat dari seluruh komponen bangsa khususnya penyelenggara negara dengan reformasi di segala bidang. Melalui reformasi diharapkan adanya perubahan paradigma dalam pemerintahan yaitu pemerintahan yang baik dan berwibawa (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).

Dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang taat pada hukum, berperadaban modern, demokratis, adil makmur dan bermoral tinggi, diperlukan dukungan para aparatur negara yang punya integritas tinggi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional

Aparatur negara merupakan abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat yang dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian aparatur negara wajib melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan tersebut.

Melimpahnya kekayaan alam yang dimiliki Indonesia merupakan modal dasar pembangunan nasional, namun demikian kualitas sumber daya manusia justru mempunyai peran lebih penting dalam menentukan berhasil atau gagalnya mewujudkan cita-cita pembangunan. Sumber daya manusia adalah asset pokok yang merupakan faktor penentu bagi keberhasilan dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Sumber daya manusia merupakan makhluk yang mengolah sumber daya alam sehingga menghasilkan apa yang dinamakan "kultur atau kebudayaan". Oleh karena itu semakin tinggi tingkat peradaban manusia, maka kultur tetap merupakan kekuatan dinamik yang sangat penting dalam menciptakan *outcome* baru. Manusia merupakan sumber daya yang mempunyai kemampuan untuk berpikir secara rasional maupun irasional dan kemampuan itu dapat menampakkan dirinya dalam bentuk yang positif dan negatif. Dalam bentuknya yang positif kemampuan berfikir secara rasional memungkinkan seseorang mampu mendahulukan kewajibannya, ketimbang haknya. Orang-orang seperti ini akan cepat tanggap dan bersungguh-sungguh, tingkah lakunya akan selalu menyenangkan orang lain dan berbuat secara objektif (tidak dibuat-buat).

Dengan kata lain orang seperti ini akan mengikuti apa yang diinginkan oleh hati nuraninya, karena pada akhirnya hati nuranilah yang dapat menilai mana yang baik dan mana yang buruk dalam kaitannya dengan keyakinannya. Dalam bentuknya yang negatif kemampuan manusia apabila tidak terkendali dan diarahkan secara tepat dapat berujud sikap, perilaku dan tindak tanduk yang semata-mata mementingkan diri sendiri tidak peduli apa akibatnya kepada orang lain atau kepada orang dimana seseorang itu menjadi anggota. Dengan demikian sikap manusia merupakan titik awal penentu dari gerakan jalan pikiran dan tindak-tanduknya dalam kehidupan (organisasi).

Sikap adalah gambaran kepribadian seseorang yang diwujudkan melalui gerakan fisik dan tanggapan pikiran melalui suatu keadaan atau suatu obyek (Suit, 1996;19). Sangatlah jelas bahwa faktor sumber daya manusia memiliki posisi yang strategis bagi terwujudnya tujuan yang dicita-citakan oleh sebuah organisasi. Oleh karena itu diperlukan tata cara pengelolaan sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya. Tercapai atau tidaknya tujuan sangat ditentukan oleh sikap dan tindakan manusia dalam melaksanakan pekerjaan dalam organisasi atau institusi.

Pelalawan adalah salah satu kabupaten yang ada diwilayah Indonesia yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan UU. No. 53 Tahun 1999, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999. Sementara peresmian operasionalnya dilakukan oleh Bapak Gubernur Riau pada tanggal 5 Desember 1999, dimana Kabupaten Pelalawan

sebagai Ibu Kota Kabupaten Pelalawan. Dengan dilatarbelakangi Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 maka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pelalawan perlu dilakukan penataan kembali organisasi perangkat pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan. Sekretaris daerah sebagai bagian dari perangkat pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan, dimana struktur organisasi dan tata kerjanya telah ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2008 disebutkan bahwa sekretariat Daerah merupakan unsur staf, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Pelalawan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab membantu Bupati Pelalawan, Sekretaris Daerah menyusun kegiatan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, termasuk urusan pengelolaan keuangan daerah. Baik dengan dinas maupun dengan lembaga teknis daerah. Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 disamping menjalankan tugas dan kewajibannya, Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah

Ini selaras dengan semangat reformasi, Pemerintah Pusat mengeluarkan

Melalui undang-undang ini Pemerintah Pusat telah melimpahkan sebagian besar urusannya ke daerah. Sehingga pemerintah daerah dituntut harus bisa menerapkan manajemen pemerintahan yang baik dan efisien. Mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan atau pengawasan pendelegasian kekuasaan, koordinasi kerja, memberikan pengarahan, perintah, pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan, pembangunan komunikasi, memberikan motivasi kerja. Sesuai dengan visi Kabupaten Pelalawan maka Sekretariat Daerah merumuskan visi "Profesional Mengelola Manajemen Pemerintahan Menuju masyarakat Maju dan Sejahtera tahun 2030".

Salah satu persoalan yang dihadapi Sekretariat Daerah dalam merealisasikan visi adalah pengelolaan sumber daya manusia, yaitu bagaimana dapat menciptakan aparatur negara atau pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai kinerja optimal sehingga visi yang telah dirumuskan dapat terealisasi dengan baik. Beberapa pemberitaan tentang rendahnya kinerja PNS diberbagai Kabupaten di Indonesia, harus disikapi dengan bijak agar dapat ditemukan berbagai cara yang dengan mudah dapat mengembalikan atau meningkatkan kembali kinerja PNS. Pemberitaan tentang tertangkapnya PNS yang berada di luar kantor pada jam kantor untuk kepentingan pribadi, PNS yang menyalah gunakan wewenang yang dimilikinya, PNS yang bekerja seenak dirinya sendiri dan masih banyak indikasi lain yang memperkuat bahwa memang kinerja PNS merupakan masalah yang

Manajemen pelayanan pada sektor publik sebagai keseluruhan kegiatan pengelolaan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dituntut memiliki karakteristik, memiliki tujuan sosial dan akuntabel pada publik. Sejalan dengan perkembangan manajemen penyelenggaraan negara, dan dalam upaya mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas, paradigma pelayanan publik terfokus pada kepuasan pelanggan. Pada dasarnya di dalam diri setiap aparatur negara (PNS) melekat peran, tugas dan tanggung jawab dilandasi oleh nilai, kode etik dan moral. Ini artinya aparatur negara merupakan sebagian dari keseluruhan elemen sistem pelayanan publik yang begitu luas dan kompleks, karena itu peran dan fungsi aparatur negara begitu penting dan strategis.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja PNS merupakan salah satu fenomena yang menyebabkan rendahnya tingkat kinerja PNS. Setiap PNS selalu mempunyai harapan ketika mereka berminat untuk melakukan suatu pekerjaan, sehingga ketika pada proses rekrutmen mereka bersedia melakukan apapun untuk dapat diterima sebagai pegawai. Melalui pekerjaannya itulah mereka akan mencocokkan apakah pada kenyataannya harapan-harapan yang diinginkan dapat terpenuhi. Harapan yang dapat dipenuhi, mereka akan merasakan adanya kepuasan dalam bekerja, sebaliknya mereka yang merasa harapannya tidak dapat terpenuhi, maka mereka merasa adanya ketidakpuasan dalam bekerja. Oleh karena itu apakah seseorang bersedia melakukan pekerjaannya dengan baik atau tidak

tidak, sangat mungkin tergantung dari dicapai tidaknya kepuasan dalam berkerja tersebut.

Kepuasan kerja seseorang tidak begitu saja datang, tetapi mempertimbangkan harapan dengan apa yang dirasakan dalam pekerjaannya. Sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi bahwa harapan manusia itu tidak terbatas, namun demikian berdasarkan skala prioritas penting, bahwa penerapan fungsi-fungsi manajemen dengan baik merupakan harapan dari banyak pegawai. Mereka berharap puimpinan dapat melakukan perencanaan (*planning*) dengan baik (agar mereka tahu hendak dibawa kearah mana mereka bekerja), pengorganisasian (*organizing*) dengan baik (mereka harus tahu tugas, wewenang dan tanggungjawabnya), penggerakan kerja (*actuating*) yang jelas (kejelasan bagaimana, kapan dan apa yang harus dikerjakan) dan pengawasan (*controlling*) yang tepat (mereka harus memahami bagaimana penilaian kinerja dilakukan).

Secara ringkas bahwa dasar pemikiran dari penelitian ini dimulai dari adanya masalah mengenai kinerja PNS, masalah kinerja ini disebabkan oleh tidak diperolehnya kepuasan kerja, kepuasan kerja tidak diperoleh karena harapan atas penerapan fungsi-fungsi manajemen di tempat kerja tidak terpenuhi. Berdasarkan uraian ini, untuk lebih menegaskan kemana penelitian ini akan dilakukan, maka judul yang diangkat adalah "Pengaruh Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Pegawai Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Balaesara".

## 1.2. Rumusan masalah.

Dengan mengacu pada uraian mengenai latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah secara langsung perencanaan kerja mempunyai pengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan ?
2. Apakah secara langsung pengorganisasian yang dilakukan mempunyai pengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan ?
3. Apakah secara langsung penggerakan kerja mempunyai pengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan ?
4. Apakah secara langsung pengawasan kerja mempunyai pengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan ?
5. Apakah secara serentak variabel-variabel perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kerja mempunyai pengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan ?
6. Apakah secara langsung perencanaan kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja pegawai di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan ?

7. Apakah secara langsung pengorganisasian yang dilakukan mempunyai pengaruh terhadap kinerja pegawai di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan ?
8. Apakah secara langsung penggerakan kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja pegawai di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan ?
9. Apakah secara langsung pengawasan kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja pegawai di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan ?
10. Apakah secara langsung kepuasan kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja pegawai di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan ?
11. Apakah secara serentak variabel-variabel perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan kepuasan kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja pegawai di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan ?

### **1.3. Tujuan Penelitian.**

Sejalan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk :

1. Membuktikan pengaruh langsung perencanaan kerja terhadap

2. Membuktikan pengaruh langsung pengorganisasian yang dilakukan terhadap kepuasan kerja pegawai di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan
3. Membuktikan pengaruh langsung penggerakan kerja terhadap kepuasan kerja pegawai di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan
4. Membuktikan pengaruh langsung pengawasan kerja terhadap kepuasan kerja pegawai di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan
5. Membuktikan pengaruh serentak variabel-variabel perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan kerja terhadap kepuasan kerja pegawai di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan
6. Membuktikan pengaruh langsung perencanaan kerja terhadap kinerja pegawai di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan
7. Membuktikan pengaruh langsung pengorganisasian yang dilakukan terhadap kinerja pegawai di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan
8. Membuktikan pengaruh langsung penggerakan kerja terhadap kinerja pegawai di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan

9. Membuktikan pengaruh langsung pengawasan kerja terhadap kinerja pegawai di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan
10. Membuktikan pengaruh langsung kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan
11. Membuktikan pengaruh serentak variabel-variabel perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan

#### **1.4. Manfaat Penelitian.**

Setiap penelitian yang dilakukan, didalamnya sudah terkandung harapan agar hasil penelitian tersebut mempunyai manfaat yang seluas-luasnya. Demikian pula dengan penelitian ini, diharapkan hasilnya mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Penelitian ini diharapkan menambah deretan bukti empirik tentang pengaruh penerapan fungsi manajemen pada institusi birokrasi terhadap kepuasan dan kinerja pegawai.

2. Bagi pimpinan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan.

Hasil penelitian merupakan informasi penting dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kinerja pegawai

Hasil penelitian yang berbentuk tesis ini dapat digunakan sebagai salah syarat untuk memperoleh gelar magisr Manajemen (MM) di Program Pascasarjana UMY.

4. Bagi Masyarakat.

Hasil ini dapat digunakan sebagai wawasan jasa atau lebih itu,

yaitu dengan melakukan hal-hal yang berikut ini: